



► EKONOMI WARGA

Pemkot Perlu Evaluasi Hotel

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja diminta tidak hanya memperpanjang moratorium, tetapi juga harus mengevaluasi hotel.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

► Banyak hotel yang masih mengambil berbagai produk dari luar Jogja.

► Tidak ada aturan yang bisa memaksa semua hotel mengakomodasi produk UKM.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Nasrul Khoiri meminta Pemerintah Kota Jogja perlu mengevaluasi keberadaan hotel yang sudah ada saat ini. Ia menyatakan keberadaan hotel harus memberikan dampak bagi warga Jogja, khususnya yang tinggal di sekitar hotel.

Pasalnya, banyaknya hotel di Kota Jogja dinilai belum memberikan dampak bagi perekonomian warga sekitar hotel.

Senada disampaikan Kepala Bidang UKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja, Tri Karyadi Riyanto. Tri Karyadi menyebut banyak hotel yang belum mengakomodasi produk hasil usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Harapan kami semua hotel bisa ikut membantu mempromosikan produk UKM yang berada di sekitar hotel," kata Tri Karyadi Riyanto, Minggu (17/12).

Tri Karyadi mengatakan banyak hotel yang masih mengambil berbagai produk dari luar mulai dari produk makanan, minuman, hingga barang kerajinan yang dipajang di hotel. Bahkan untuk batik yang merupakan ciri khas Jogja, kata dia, juga belum banyak menghiasi hotel-hotel.

Pihaknya sempat menanyakan kepada sejumlah pengelola hotel untuk mengambil produk UKM. Sayangnya, belum ada tindak lanjutnya karena tidak ada aturan yang bisa memaksa semua hotel mengakomodasi produk UKM. "Kalau ada permintaan saya kira UKM juga bisa memperbaiki apa yang kurang dan bagaimana kemasan produk yang bagus dan menarik agar bisa masuk ke hotel," ujar Tri Karyadi.

Tri Karyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, sebagai organisasi para pengelola hotel, untuk membuat semacam kesepakatan bersama yang bisa memaksa hotel ikut memasarkan produk UKM. Ia menargetkan, kesepakatan tersebut bisa terwujud pada awal tahun depan.

Kesepakatan itu rencananya dibarengi dengan pembentukan tim pengawas untuk memastikan produk UKM masuk hotel, serta tim seleksi produk agar pengelola UKM mengetahui apa yang kurang dalam produknya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah PHRI DIY, Istidjab Danunagoro mengaku belum mendapat informasi lengkap terkait dengan rencana kesepakatan bersama dengan Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja. Namun, ia menyadari belum semua hotel mengakomodasi produk UKM.

"Sebagian sudah ada yang masuk, seperti jajanan pasar, sayur dan buah-buahan itu ada yang dipasok warga sekitar," kata dia.

Istidjab mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memaksa hotel menggunakan produk warga sekitar, namun pihaknya sudah mengimbau sejak lama dan sudah ada beberapa yang mengambil produk UKM.

Jenis Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Legatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005